


Terbit online pada laman web jurnal : <http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS>

 <b>Fakultas Sastra</b> <b>Universitas Ekasakti</b>	<b>JURNAL JIPS</b> <b>(Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)</b>	
	Vol. 6 No. 3 ISSN : 2579-5449 (media cetak)	E-ISSN : 2597-6540 (media online)

## Penatausahaan Keuangan Non Tunai pada Bendahara RSUD dr. Rasidin Padang

**Reflinda**

STIA Adabiah Padang, [reflindasyafwardi65@gmail.com](mailto:reflindasyafwardi65@gmail.com)

### **Abstract**

*Penatausahaan keuangan non tunai merupakan langkah awal dalam mewujudkan good governance. Dengan adanya penatausahaan non tunai maka seluruh transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Selain itu penatausahaan keuangan non tunai juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan aktual sehingga dapat dengan mudah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja keuangan.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penatausahaan Keuangan Non Tunai pada Bendahara RSUD dr. Rasidin Padang, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Menurut Chabib dan Heru (2010:10) pengelolaan keuangan mencakup 5 hal yakni : akuntabilitas, pengukuran kinerja keuangan, kejujuran, transparansi dan pengendalian.*

*Teknik pemilihan informan adalah purposive sampling. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan informan berjumlah 21 orang yang terdiri atas Staf dan Rekanan (pihak ke-3) di RSUD dr. Rasidin Padang. Sumber data diambil dari data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder berupa dokumen-dokumen pendukung.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penatausahaan Keuangan Non Tunai pada Bendahara RSUD dr. Rasidin Padang secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada terdapat kendala yakni kurang lancarnya akses internet. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas jaringan internet dan peningkatan kualitas perangkat komputer.*

*Keywords: Penatausahaan Keuangan, Non Tunai*

© 2022Jurnal JIPS

### **I INTRODUCTION**

Mewujudkan suatu tata kelola penatausahaan keuangan yang baik merupakan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran melalui laporan keuangan, karena laporan keuangan mampu mengungkapkan posisi keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk mewujudkan

*Good Governance* dilingkungan Rumah Sakit, Khususnya RSUD dr. Rasidin Padang.

Rumah sakit sebagai institusi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan hendaknya memiliki sistem penatausahaan keuangan yang baik yang dapat diwujudkan dengan pemberian pelayanan yang efektif dan

efisien dalam bidang administrasi keuangan. Salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan sistem keuangan non tunai pada bendahara pengeluaran.

Penerapan Transaksi non tunai merupakan perubahan sistem yang diterapkan untuk melakukan perkembangan dalam transparansi penatausahaan keuangan. Dengan adanya transaksi non tunai, bendahara mampu memberikan informasi secara cepat, dan dapat diuraikan secara rinci setiap prosesnya. Transaksi non tunai mampu memberikan akuntabilitas, transparansi, dan efisien dalam Penatausahaan Keuangan RSUD dr. Rasidin Padang.

Dalam upaya peningkatan sistem penatausahaan keuangan daerah yang efisien maka pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, yang sesuai dengan ketentuan pasal 283 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Transaksi non tunai merupakan transaksi yang tidak melakukan pembayaran secara tunai tetapi dengan cara pemindahbukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lainnya.

Di era perkembangan informasi dan teknologi saat ini, penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggung jawaban keuangan perangkat daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah. Selain itu, sistem transaksi non tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran uang. Adapun proses penerapan sistem non tunai ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang telah menerapkan sistem transaksi non tunai. Dimana penerapannya didasari sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah dan merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan *good governance* yang berbasis teknologi. Untuk memaksimalkan penerapan transaksi non tunai, Pemerintah Kota Padang terus melakukan upaya pengembangan dengan mensosialisasikan penerapan non tunai kepada semua pihak yang terkait. Salah satu perangkat daerah di Kota Padang yang telah menerapkan sistem transaksi non tunai adalah RSUD dr. Rasidin Padang.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara pengeluaran RSUD dr. Rasidin Padang ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara pengeluaran RSUD dr. Rasidin Padang ?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara pengeluaran RSUD dr. Rasidin Padang ?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara pengeluaran RSUD dr. Rasidin Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara pengeluaran RSUD dr. Rasidin Padang.

Untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara pengeluaran RSUD dr. Rasidin Padang.

## II RESEARCH METHODS

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Moeleong, 2007:4). Metode penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak (Sugiyono, 2007:3). Tipe pendekatan kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif, deskriptif adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor yang menjadi fokus peneliti, hal ini sangat relevan dengan judul penelitian yang berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan yang tidak mengumpulkan data saja tetapi juga menganalisa data yang telah diperoleh tersebut.

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Arikunto (2006:145) Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, jadi subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta yang ada dilapangan.

Informan menurut Wahyudi Kumorotomo (1998:11) dan Subando Agus Margono, (2007:159) adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara yang diperkirakan, menguasai masalah penelitian dan memahami data informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Teknik pemilihan informan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85), teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini dipilih karena informan yang dipilih hanyalah pihak – pihak yang terkait dengan tema dan judul yang peneliti angkat. Adapun informan yang dimaksud adalah :

**Tabel 3.1 : Informan Penelitian**

No	Uraian	Jumlah
1	Direktur (Pimpinan RSUD dr. Rasidin Padang)	1 Orang
2	Kepala Bidang Administrasi Umum dan Keuangan di RSUD dr. Rasidin	1 Orang
3	Kasi Keuangan RSUD dr. Rasidin	1 Orang
4	Bendahara Penerimaan RSUD dr. Rasidin	1 Orang
5	Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD dr. Rasidin	1 Orang
6	Pembantu Bendahara Pengeluaran RSUD dr. Rasidin	2 Orang
7	Staf Keuangan RSUD dr. Rasidin	3 Orang
8	PPTK Kegiatan RSUD dr. Rasidin	2 Orang
9	Sekretariat Kegiatan RSUD dr. Rasidin	4 Orang
10	Rekanan (Pihak Ke-3) RSUD dr. Rasidin	3 Orang
11	Staf IT RSUD dr. Rasidin	2 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>21 Orang</b>

*Sumber : Olahan sendiri*

Menurut Sugiyono (2013:285) dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *Natural Setting* (kondisi alamiah). Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara Menurut Sugiyono (2013:137) adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang

dikerjakan. Pedoman wawancara digunakan untuk meningkatkan interviewer mengenai aspek – aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek – aspek yang relevan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.

Dalam hal ini responden yang dipilih adalah para pengelola Lembaga Kesehatan yang bersangkutan meliputi, adalah Kepala Bidang Keuangan, Bendahara, dan Staff Keuangan di RSUD dr. Rasidin Padang.

## 2. Observasi (*observation*)

Menurut S. Margono (2007:159) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek, interaksi subjek dengan peneliti serta hal – hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

## 3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi menurut Sugiyono (2013:150) adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku yang relevan, peraturan – peraturan, laporan kegiatan, foto – foto, file dokumen, dan data yang relevan dengan penelitian.

Analisis data Menurut Sugiyono (2012:240) adalah proses pengumpulan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola kategori dari satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Adapun langkah – langkah yang diterapkan peneliti dalam menganalisa data yaitu pengumpulan data, reduksi data, paparan atau penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama dan sesudah penelitian.

### 1. Pengumpulan Data

Dalam proses ini peneliti melakukan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh mengenai catatan lapangan mengenai objek yang diteliti.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data menurut Sugiyono (2013:247) adalah pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data dari catatan yang tertulis dilapangan. Dalam proses ini, peneliti melakukan pemilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang dan mana yang merupakan ringkasan dan cerita apa yang sedang berkembang. Proses ini berlangsung dari awal hingga akhir penelitian selama penelitian dilaksanakan. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bila ditarik yang disesuaikan dengan data – data yang relevan atau data yang cocok dengan tujuan pengambilan data dilapangan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

### 3. Penyajian data

Penyajian data Menurut Sugiyono (2013 : 250) adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data ini, semua data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis sehingga menghasilkan deskripsi tentang Pelayanan Tenaga Administrasi dalam Penerimaan Kas Rumah Sakit di RSUD dr Rasidin Padang.

### 4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian ini didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu pada penyajian data. Dengan kata lain penarikan kesimpulan harus didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan.

### Waktu dan Tempat Penelitian

Pada penelitian ini lokasi yang peneliti pilih yakni di Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Padang. Dengan alasan karena keterbatasan waktu biaya dan kemampuan peneliti dalam mendapatkan data dan informasi terkait Prosedur Penatausahaan Keuangan Non Tunai pada Bendahara Pengeluaran RSUD dr. Rasidin Padang.

### III RESULTS AND DISCUSSIONS

Penatausahaan Keuangan Non Tunai pada Bendahara RSUD dr. Rasidin Padang

Reformasi sistem keuangan daerah di Indonesia telah menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah dimana pemerintah daerah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan daerah melalui laporan keuangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat untuk melihat seberapa jauh tingkat pemakaian anggaran daerah terhadap kinerja aparatur pemerintahan dalam pelayanan masyarakat.

Dalam upaya menciptakan Pemerintah yang akuntabel dan transparan Pemerintah diharuskan menciptakan inovasi baru. Kebijakan transaksi non tunai ini merupakan inovasi baru sehingga dalam implementasinya perlu menyesuaikan perpindahan dari sistem lama ke sistem baru. Selain meningkatkan efektivitas, kebijakan non tunai juga mendorong *inklusi* keuangan karena dengan transaksi non tunai para pengguna layanan dalam hal ini bendahara dapat mengakses dan menggunakan layanan perbankan.

Pemerintah Kota Padang mengimplementasikan pembayaran transaksi non tunai melalui aplikasi berbasis web yaitu Nagari Cash Management (NCM) yang bekerja sama Bank Nagari. NCM merupakan layanan yang diberikan bank dengan menggunakan internet sebagai instrument utama yang dikhususkan untuk nasabah (non-pribadi) seperti perusahaan atau organisasi pemerintah secara online dan realtime yang ditujukan untuk memudahkan suatu organisasi dalam melakukan transaksi keuangan serta pengawasan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem ini bendahara dapat melakukan transaksi secara online dikomputer dan tidak perlu lagi membawa cek giro untuk mengambil uang tunai.

Diterapkannya kebijakan transaksi non tunai diharapkan mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti halnya tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor keuangan negara.

#### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal.

Secara umum akuntabilitas dipahami sebagai :

- Kewajiban seseorang/lembaga untuk memberikan laporan yang memuat atas tindakan sebagai akibat wewenang yang dimiliki/diterima
- Pengukuran tanggung jawab yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan atau dasar lain yang ditentukan sebelumnya
- Kewajiban membuktikan kinerja yang baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan Direktur RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Senin, 28 Maret 2022, pukul : 13.10) yang berinisial "H", mengatakan bahwa :

*" Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan. Penerapan transaksi non tunai dapat memberikan inovasi dan rangkaian informasi keuangan yang lengkap dan kompeten sehingga dapat dengan mudah dipahami. Namun hal ini juga harus dibekali dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditunjuk untuk melaksanakannya".*

Dari hasil wawancara dengan Kabid Administrasi Umum dan Keuangan RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Senin, 28 Maret 2022, pukul : 14.00) yang berinisial "G", mengatakan bahwa :

*" Penatausahaan keuangan non tunai mampu memberikan hasil yang positif dalam menciptakan akuntabilitas pelaporan. Hal ini dapat terwujud karena transaksi non tunai tercatat secara sistem sehingga dapat menghasilkan data dan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (efektif dan efisien)".*

Mengacu pada pemahaman diatas, maka jelas bahwa akuntabilitas memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari tanggungjawab, karena dalam akuntabilitas terkandung dimensi kepuasan dari para pihak yang telah memberi wewenang kepadanya serta adanya kewajiban membuktikan

bahwa kinerja yang dicapai atas penggunaan wewenang tersebut telah sesuai dengan standar yang telah disetujui sebelumnya.

Akuntabilitas laporan keuangan RSUD dr. Rasidin Padang pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1 Laporan Fungsional RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2021**

N o.	Kegiat an	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
1	Progra m penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	104.582.553.822	40.800.773.152	63.781.780.670
2	Progra m pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	12.313.189.802	10.330.494.058,23	1.982.695.743,77
3	Progra m peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	7.347.500.000	4.411.607.256	2.935.892.744

Jumla h	124.243.243.624	55.542.874.455,23	68.700.369.158,77
---------	-----------------	-------------------	-------------------

Sumber : Laporan Fungsional APBD Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya laporan yang lengkap maka dapat terlihat realisasi dari kegiatan-kegiatan yang dapat dicapai. Hal ini merupakan suatu sumber indikator yang dapat menciptakan akuntabilitas keuangan. Selain itu, berdasarkan laporan tersebut dapat dilakukan penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran berlangsung. Dari data diatas dapat dilihat bahwa RSUD dr. Rasidin telah merealisasikan anggarannya sebesar Rp. 55.542.874.455,23,- untuk biaya operasional rumah sakit.

## 2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Indikasi keberhasilan pelaksanaan penatusahaan keuangan adalah terjadinya peningkatan pelayanan yang semakin baik, maju, berkeadilan, pemerataan serta adanya koordinasi antar lembaga yang berwenang. Hal tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan penatusahaan keuangan menggunakan konsep *value for money* (pengukuran kinerja keuangan).

*Value for money* merupakan jembatan yang menghantarkan pemerintah untuk mencapai *good governance*. *Value for money* harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan dan penatusahaan keuangan. Untuk mendukung hal ini maka diperlukan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran yang baik dan dapat dicapai apabila pemerintah daerah/instansi memiliki sistem akuntansi (pencatatan laporan) yang baik. Penatusahaan non tunai dengan menggunakan sistem pengelolan keuangan terbukti mampu menjadikan pencatatan laporan menjadi efisien, efekti dan akurat.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Keuangan RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Rabu, 30 Maret 2022, pukul:14.15) yang berinisial "N", mengatakan bahwa :

*" Penatusahaan keuangan non tunai harus dilakukan secara hati-hati agar pencatatan laporan keuangan dapat dilakukan dengan maksimal, efektif dan efisien. Proses penyusunan anggaran juga merupakan hal yang tak kalah penting dari proses perencanaan dalam mengukur indikator kinerja"*.

Dari hasil wawancara dengan PPTK RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Selasa, 29 Maret 2022, pukul : 11.00) yang berinisial "SA", mengatakan bahwa :

*" Pengukuran indikator kinerja dapat dilihat dari pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang relatif murah, dapat menghasilkan output yang maksimal dan berdaya guna serta mampu mencapai target-target dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang dituangkan dalam perencanaan dan penganggaran".*

Pengukuran indikator kinerja dapat dilihat pada tabel perencanaan anggaran RSUD dr. Rasidin Padang Tahun Anggaran 2021 berikut ini :

**Tabel 5.2 Anggaran RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2021**

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	104.582.553.822
2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	12.313.189.802
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	7.347.500.000
	<b>Jumlah</b>	<b>124.243.243.624</b>

Sumber : Laporan Fungsional APBD Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan, konsep value for money (pengukuran kinerja keuangan) merupakan salah satu pendukung dalam pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan yang berorientasi pada kinerja keuangan. Hal ini penting terutama untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik dalam penatausahaan keuangan non tunai. Dari data diatas dapat dilihat bahwa RSUD dr. Rasidin Padang memiliki anggaran sebesar Rp. 124.243.243.624,- pada tahun anggaran 2021. anggaran ini ditujukan untuk membiayai segala kebutuhan operasional rumah sakit yang terdiri

atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

### 3. Kejujuran

Pengelolaan keuangan harus dapat dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan. Kinerja aparatur pemerintahan akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokrasi dalam pemerintahan.

Pengukuran akuntabilitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif karena belum tersedianya suatu sistem pengukuran yang menginformasikan tingkat keberhasilan organisasi serta masih adanya anggapan bahwa keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintahan tergantung dari kemampuan instansi tersebut menyerap anggaran tanpa mengukur hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program. Mencari orang yang jujur dan memiliki integritas tinggi sama halnya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Memilih aparatur atau pelaku pemerintahan yang unggul akan berpengaruh baik dengan penyelenggaraan negara. Untuk menghindari terjadinya korupsi Penatausahaan keuangan di RSUD dr. Rasidin Padang dilakukan secara non tunai (online) dengan menggunakan sistem yang dikelola oleh Bank Nagari Sumatera Barat. Setiap transaksi dilakukan dengan sistem transfer antar rekening/antar bank. Bendahara pengeluaran tidak perlu lagi menyediakan uang tunai untuk pembayaran seluruh biaya operasional rumah sakit. Setiap transaksi akan dicatat sesuai dengan bukti bayar dan dapat di sesuaikan dengan rekening koran dari bank.

Hal ini juga berlaku pada penerimaan RSUD dr. Rasidin Padang yang bersumber dari APBD dan pendapatan BLUD (layanan kepada pasien). Setiap transaksi yang diterima akan langsung di setor setiap harinya dan setiap jam 17.00 sore dilakukan pemindah bukuan kepada rekening pengeluaran BLUD oleh pihak bank. Sehingga dana yang ada dapat langsung dimanfaatkan sesuai kebutuhan oleh bendahara pengeluaran dan tidak menumpuk dalam kas bendahara penerimaan.

Dari hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD dr. Rasidin Padang

(pada hari Rabu, 30 Maret 2022, pukul : 11.15) yang berinisial “ED”, mengatakan bahwa :

*“Dengan adanya transaksi non tunai maka bendahara tidak perlu lagi memegang uang cash sehingga resiko dapat dihindari. Untuk menggunakan transaksi dengan sistem maka diperlukan fasilitas teknologi berupa jangkauan internet . selain itu juga harus didukung oleh SDM yang mampu mengelola penatausahaan secara non tunai”.*

Dari hasil wawancara dengan Pembantu Bendahara Pengeluaran RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Rabu, 30 Maret 2022, pukul : 11.50) yang berinisial “RS”, mengatakan bahwa :  
*“Jika semuanya dapat berjalan lancar maka proses pelaporan juga kan lebih mudah, karena alur pembayaran akan tercatat pada rekening koran sehingga dapat menghindari resiko salah dalam melakukan proses penatausahaan dan pelaporan keuangan”.*

Dari hasil wawancara dengan Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Selasa, 29 Maret 2022, pukul : 13.00) yang berinisial “H”, mengatakan bahwa :

*“Setiap harinya pada pukul 17.00 akan dilakukan pemindahbukuan ke rekening bendahara pengeluaran BLUD oleh pihak bank. Proses pemindahbukuan secara langsung ini sangat membantu bendahara penerimaan karena secara otomatis uang berpindah ke rekening pengeluaran sehingga saldo kas tidak menumpuk. Hal ini juga dapat menghindari anggapan penumpukan kas karena uang yang telah ditransfer dapat langsung digunakan untuk pembayaran biaya operasional rumah sakit”.*

Dari hasil wawancara dengan Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Selasa, 29 Maret 2022, pukul : 13.15) yang berinisial “S”, mengatakan bahwa :

*“Penyetoran dilakukan setiap hari kerja. Penyetoran dari layanan kepada pasien dilakukan secara manual (langsung ke bank) sedangkan dana masuk yang bersumber dari BPJS dan Jasa Raharja langsung ditranfer ke rekening bendahara penerimaan”.*

#### 4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan Horizontal

accountability antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang bersih, efisien, efektif, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Selama ini transparansi atau keterbukaan menjadi suatu hal yang mahal, apalagi menyangkut informasi dan data keuangan. Data keuangan dipandang sebagai rahasia negara yang tidak semua orang boleh mengetahuinya. Padahal dana keuangan merupakan dana publik. Laporan keuangan untuk mendukung keputusan ekonomi, sosial dan politik meliputi informasi yang digunakan untuk :

1. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan
2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional
3. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya
4. Membantu evaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas

Tranparansi penatausahaan keuangan dapat dilihat pada laporan keuangan yang disusun selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan RSUD dr. Rasidin Padang disusun sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditujukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisa Anggaran , Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas pemerintahan sekaligus merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Laporan keuangan memiliki fungsi :

1. Sebagai dasar pengambilan keputusan
2. Sebagai alat untuk penilaian dan evaluasi kinerja

Dari hasil wawancara dengan staf keuangan (Akuntan) RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Selasa, 29 Maret 2022, pukul : 10.15) yang berinisial “I”, mengatakan bahwa :

*“RSUD dr. Rasidin Padang menyusun 2 laporan keuangan setiap tahunnya yaitu Laporan Keuangan RSUD dr. Rasidin Padang dan Laporan Keuangan BLUD RSUD dr. Rasidin Padang yang disusun berdasarkan SAP dan diajukan ke BPKAD Kota Padang”*



Laporan keuangan RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.3 Neraca RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2021**

N o.	Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
	<b>Belanja Operasional</b>	<b>124.243.243.624</b>	<b>68.810.033.053</b>	<b>55.433.210.571</b>
1	Belanja Pegawai	49.429.259.870	32.817.633.804	16.611.626.066
2	Belanja Barang dan Jasa	61.006.930.732	14.874.551.292	46.132.379.440
3	Belanja Modal	13.807.053.022	7.850.689.369,23	5.956.363.652,77
	<b>Jumlah</b>	<b>124.243.243.624</b>	<b>55.542.874.455,23</b>	<b>68.700.369.158,77</b>

Sumber : Laporan Fungsional APBD Tahun 2021

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa RSUD dr. Rasidin Padang telah menyusun laporan keuangan dengan sangat baik dan transparan. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan mampu dilaksanakan dengan target yang telah dicapai.

#### 5. Pengendalian

Pendapatan dan belanja harus sering dievaluasi, yaitu dibandingkan antara rencana anggaran dengan target yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis *varians* terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin di cari penyebab timbulnya *varians* untuk kemudian dilakukan antisipasi kedepan.

Anggaran pendapatan dan belanja merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran pendapatan sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh rumah sakit RSUD dr. Rasidin Padang, sedangkan anggaran belanja sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang dibelanjakan.

Dari hasil wawancara dengan staf keuangan RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Rabu, 30

Maret 2022, pukul : 11.30) yang berinisial “YD”, mengatakan bahwa :

*“Menyusun anggaran membutuhkan pertimbangan-pertimbangan teknis yang matang. Hal ini dilakukan untuk mengestimasi biaya operasional yang dikeluarkan rumah sakit dan ketersediaan dana (kondisi ekonomi rumah sakit). Maka dalam hal ini akuntansi pelaporan memiliki peran yang efektif dalam menginformasikan kondisi keuangan rumah sakit”.*

RSUD dr. Rasidin Padang harus melakukan pengendalian agar alokasi dana lebih efektif dan efisiensi. Adanya kegagalan efisiensi yang terjadi dimasa lalu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Pengeluaran belum berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik
2. Tidak proaktif untuk mengeliminasi sumber pemborosan keuangan yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah daerah
3. Tidak ada pengeluaran yang memadai mengenai sifat biaya

Untuk melakukan pengendalian terhadap anggaran dan belanja maka perlu diadakan pendekatan secara strategik yaitu melakukan pengurangan terhadap biaya-biaya yang kegiatannya tidak bersifat penting. Pengendalian pengeluaran dapat dilakukan melalui perencanaan dan pengendalian aktivitas yaitu dengan cara:

1. Pemilihan aktivitas : Memilih sasaran penting dan yang tidak penting.
2. Pengurangan aktivitas : mengurangi waktu dan sumber daya yang digunakan
3. Penghilangan aktivitas dan fungsi : memangkas anggaran yang tidak diperlukan sam sekali

Dari hasil wawancara dengan staf keuangan RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Selasa, 29 Maret 2022, pukul : 11.45) yang berinisial “ER”, mengatakan bahwa :

*“ Penggunaan anggaran berorientasi pada kinerja untuk melakukan efisiensi dalam pengeluaran (Biaya operasional rumah sakit). Untuk melakukan pengendalian, salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan strategik yaitu memfokuskan pengeluaran pada pengurangan biaya secara signifikan”.* Pengendalian terhadap anggaran dan belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.4 Laporan Realisasi Belanja RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2021**

N o.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	104.582.553.822	40.800.773.152	39
2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	12.313.189.802	10.330.494.058,23	83
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	7.347.500.000	4.411.607.256	60
	<b>Jumlah</b>	<b>124.243.243.624</b>	<b>55.542.874.455,23</b>	<b>44</b>

Sumber : Laporan Fungsional APBD Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2021 belum maksimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang menunjukkan realisasi sebesar 44 % yaitu Rp. 55.542.874.455,23,- dari Rp. 124.243.243.624,-

Kurangnya realisasi tersebut terjadi karena adanya beberapa kegiatan yang belum merealisasikan anggaran sesuai target yang ditentukan.

A. Kendala-kendala yang dihadapi Penatausahaan Keuangan Non Tunai pada Bendahara RSUD dr. Rasidin Padang

Dalam mewujudkan penatausahaan keuangan yang prima maka RSUD dr. Rasidin padang menerapkan sistem non tunai agar pelayanan dapat berjalan lancar dan maksimal. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh bendahara. Dalam penerapan sistem transaksi non tunai ada beberapa kendala yang dihadapi rumah sakit. Berikut kendala-kendala yang dihadapi dalam penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara RSUD dr. Rasidin Padang yaitu :

1. Masalah internal
  - a. Sulit menerapkan sistem transaksi non tunai pada penerimaan rumah sakit sehingga saat ini penerimaan rumah sakit yang bersumber dari layanan kepada pasien masih bersifat manual dan menggunakan uang cash.
  - b. Masih kurangnya wawasan sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses penatausahaan keuangan khususnya dalam memahami penggunaan Sistem Informasi teknologi.
  - c. Kendala penerapan sistem transaksi non tunai pada bendahara pengeluaran adalah pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) yang mengalami keterlambatan, disebabkan oleh dokumen pendukung belum lengkap. Misalnya daftar bayar dari rekanan atau syarat dan kelengkapan administrasi lainnya.
  - d. Kendala pada bendahara jika salah menginput No. rekening maka pihak bank menyuruh agar memperbaiki kembali sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.
  - e. Sistem internet rumah sakit yang kurang lancar menghambat proses kerja bendahara yang mengakibatkan proses transaksi menjadi lebih lama.

2. Masalah eksternal
  - a. pihak bank yang terlambat memproses pencairan dana dikarenakan gangguan server bank atau kurangnya pelayanan.
  - b. Lamanya transaksi pembayaran belanja modal karena pembayaran belanja modal dilakukan oleh pihak BPKAD Kota Padang melalui sistem SP2D langsung.

Dari hasil wawancara dengan PPTK RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Rabu, 30 Maret 2022, pukul : 11.00) yang berinisial "S", mengatakan bahwa :

*"Pembayaran belanja modal tidak dilakukan dengan NCM, tetapi SP2D langsung menunjuk*

ke rekanan. Prosesnya pengajuan dulu dari pengelola kegiatan ke bendahara pengeluaran nanti langsung diproses setelah semua persyaratannya dipenuhi. Setelah dokumen kontraknya lengkap, kemudian dibuatkan SPPSPM oleh bendahara pengeluaran untuk diterbitkan SP2D di bidang perbendaharaan, lalu SP2D nanti langsung nunjuk ke pihak ketiga.

Dari hasil wawancara dengan Sekretariat Kegiatan (1) RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Selasa, 29 Maret 2022, pukul : 11.00) yang berinisial "W", mengatakan bahwa :

*"Proses pembayaran kepada pihak rekanan terkadang memakan waktu yang lama karena terhambat dengan sistem internet yang bermasalah. Perlu adanya peningkatan terhadap penggunaan akses internet rumah sakit karena tidak hanya berhubungan dengan pelayanan kepada pasien tapi juga terhadap penatausahaan keuangan rumah sakit"*.

Dari hasil wawancara dengan Rekanan 1 (pihak ke-3) RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Rabu, 31 Maret 2022, pukul : 10.30) yang berinisial "H", mengatakan bahwa :

*"Terjadinya kendala dalam proses pembayaran dikarenakan akses internet bermasalah dan terkadang sistem bank yang sedang error"*

Dari hasil wawancara dengan Staf IT RSUD (1) dr. Rasidin Padang (pada hari Kamis, 1 April 2022, pukul : 14.30) yang berinisial "D", mengatakan bahwa :

*"Selain akses internet yang bermasalah, juga perlu diperhatikan pemakaian komputer dan virus komputer. Ini juga merupakan salah satu penyebab lamanya koneksi jaringan dalam pembayaran non tunai"*.

Dari hasil wawancara dengan Rekanan 2 (pihak ke-3) RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Rabu, 31 Maret 2022, pukul : 14.00) yang berinisial "A", mengatakan bahwa :

*"pembayaran dengan sistem non tunai memiliki kelebihan yang baik namun juga ada kekurangannya. Salah satunya adalah dibatasinya jumlah transfer saat menggunakan aplikasi NCM. Sehingga jika transaksi dengan angka yang besar maka bendahara harus ke bank dan melakukan pembayaran dengan cek"*.

Dari hasil wawancara dengan Rekanan 3 (pihak ke-3) RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Rabu, 31 Maret 2022, pukul : 13.30) yang berinisial "R", mengatakan bahwa :

*"Terkadang tidak semua rekanan menggunakan Bank Nagari, sehingga untuk transaksi BLUD jika tranfer ke rekening lain maka akan dikenai biaya transfer sebesar Rp. 6.500,-"*.

B. Cara Mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi Penatausahaan Keuangan Non Tunai pada Bendahara RSUD dr. Rasidin Padang

Sebagai mana yang telah diuraikan di atas bahwa kendala dalam penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara di RSUD dr. Rasidin Padang adalah masih lemahnya akses internet yang menyebabkan terkendalanya penggunaan sistem bank dalam melakukan pembayaran kepada rekanan.

Untuk mengantisipasi hal ini maka pihak manajemen RSUD dr. Rasidin Padang perlu melakukan pembenahan terhadap sistem dan akses internet.

Dari hasil wawancara dengan Staf IT (2) RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Kamis, 1 April 2022, pukul : 13.30) yang berinisial "R", mengatakan bahwa :

*"Fasilitas jaringan telepon dan Internet Service Provider (ISP) sangat berpengaruh terhadap biaya pemakaian Internet dan kemungkinan akses secara keseluruhan. Selain itu, saluran telepon masih relatif lambat, yang pada gilirannya menyebabkan waktu akses menjadi lebih lama dan biaya akses menjadi mahal. Sementara itu, terbatasnya bandwidth sistem transmisi yang disediakan ISP dan banyaknya pelanggan yang mengakses pada waktu bersamaan memperparah akses terhadap Internet. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas internet dan pemeliharaan jaringan internet yang berkala di RSUD dr. Rasidin Padang"*.

Dari hasil wawancara dengan Sekretariat Kegiatan (2) RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Kamis, 1 April 2022, pukul : 11.30) yang berinisial "AY", mengatakan bahwa :

*"Pembayaran dengan sistem non tunai sangat bagus diterapkan. Peningkatan kapasitas IT perlu dilakukan agar akses internet lancar. Hal ini juga diperlukan dalam pengentrian data barang yang dibeli"*.

Dari hasil wawancara dengan Sekretariat Kegiatan (3) RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Selasa, 29 Maret 2022, pukul : 15.00) yang berinisial "U", mengatakan bahwa :

“Akses internet di RSUD dr. Rasidin Padang sudah baik, namun terkadang masih terdapat masalah dalam penggunaannya. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas akses internet. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas sdm rumah sakit agar dapat lebih memahami penggunaan IT”.

Dari hasil wawancara dengan Sekretariat Kegiatan (4) RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Kamis, 1 April 2022, pukul : 14.30) yang berinisial “O”, mengatakan bahwa :

“Tingkat kecepatan akses internet yang kurang stabil (dapat menimbulkan lama loading), dikarenakan jumlah pengguna diluar kapasitas

yang ditentukan lantaran ruangan yang kurang luas dan juga ruangan internet dan wifi tersebut hampir hari-harinya ramai dikunjungi pengguna. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi jangkauannya agar lancar”.

Menanggapi masalah diatas maka perlu solusi untuk mengatasi kendala - kendala dalam penatausahaan keuangan pada bendahara di RSUD dr. Rasidin yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas jaringan dengan menggunakan jaringan cepat
2. Meningkatkan fasilitas/perangkat komputer
3. Menggunakan genset dan ups dalam mengatasi listrik yang padam

#### IV CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara merupakan langkah awal yang diterapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Dengan adanya penatausahaan keuangan non tunai maka pembayaran (transaksi keuangan) dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Selain itu penatausahaan keuangan non tunai dapat menghasilkan laporan keuangan yang aktual. Laporan keuangan ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian dalam evaluasi kinerja dan dapat dijadikan sebagai mekanisme pertanggungjawaban dalam mengambil keputusan.
- b. Penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara pengeluaran RSUD dr. Rasidin Padang telah berjalan dengan baik walau belum optimal. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara RSUD dr. Rasidin Padang adalah sistem internet rumah sakit yang kurang lancar menghambat proses kerja bendahara yang mengakibatkan proses transaksi menjadi lebih lama. Hal ini disebabkan oleh fasilitas jaringan telpon yang relatif lambat dan terbatasnya *bandwidth*

sistem transmisi yang disediakan oleh *internet service provider (ISP)*.

- c. Cara mengatasi masalah yang dihadapi dalam penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara RSUD dr. Rasidin Padang adalah dengan meningkatkan kapasitas jaringan (menggunakan jaringan cepat) dan meningkatkan kualitas fasilitas/perangkat komputer. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penerapan penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara RSUD dr. Padang.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bagi Direktur RSUD dr Rasidin Padang agar melakukan evaluasi terhadap penggunaan sistem teknologi berbasis IT dalam penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara.
- b. Bagi Bendahara dan staf RSUD dr. Rasidin Padang agar meningkatkan kualitas SDM dengan mempelajari Teknologi berbasis IT dan senantiasa bersikap sopan dan santun dan saling menghargai dengan sesama karyawan/ti rumah sakit.

Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan untuk melengkapi skripsi dan dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan bagi pembaca.

**Bibliography**

- [1]Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- [2]Asrul. 2013. *Gerakan Peningkatan Produktivitas*. Yogyakarta : Deepublish
- [3]Azrul, Anwar. 1996. *Pengantar Ilmu Administrasi Kesehatan*. Jakarta : Binarupa Aksara.
- [4]Chabib dan Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokus Media
- [5]Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta : Pustaka Salemba Empat
- [6]Haryanto. 2007. *Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba
- [7]Kumorotomo, Wahyudi. 1998. *Sistem informasi Manajemen dalam organisasi publik* : Gajah Mada Univercity Press
- [8]Mangani. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Erlangga
- [9]Margono, Subando Agus. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Komponen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [10]Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- [11]Nafarin. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba
- [12]Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- 2012. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- 2013. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- 2016. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [13]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN*
- [14]Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- [15]Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*
- [16]Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Keuangan Negara*
- [17]Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Keuangan Negara*
- [18]PMK Nomor 162 Tahun 2013 tentang *Bendahara Penerimaan*
- [19]Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang *Implementasi TransaksiNon Tunai*
- [20]Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2020 tentang *Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD dr. Rasidin Padang*